

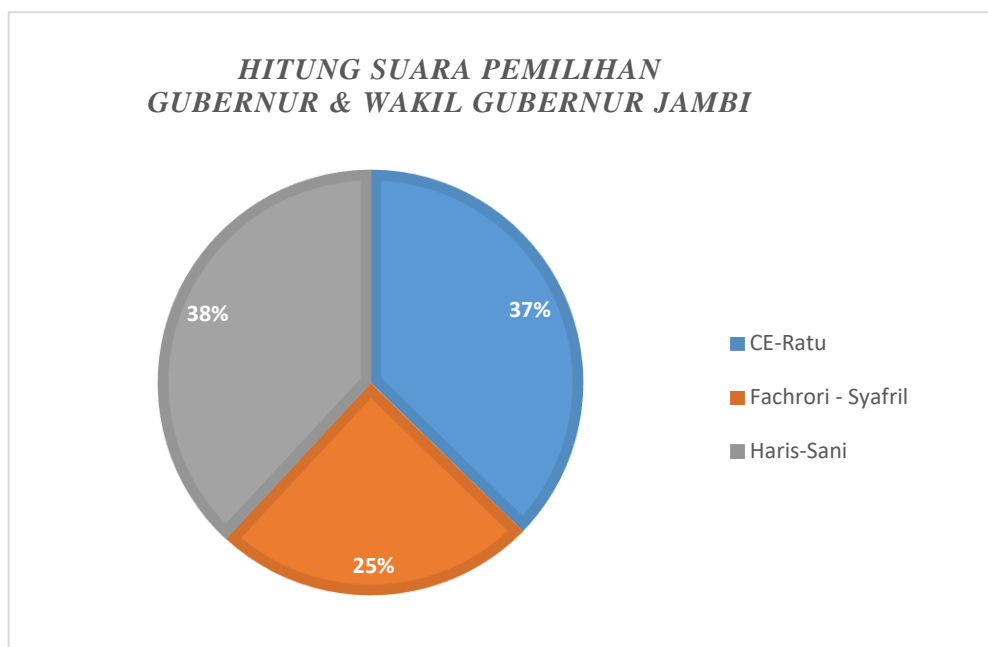
1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini adalah studi tentang relasi politik kelompok Islam terhadap pasangan calon dalam kontestasi politik lokal Indonesia yang ada di Provinsi Jambi. Pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021, total sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah yang baru. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang termasuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, dinamika dalam pemilihan Gubernur Jambi yang baru tersebut ternyata tidak bisa terlepas dari pengaruh dinamika keagamaan yang diperankan oleh ulama dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih. Kontestasi politik untuk menentukan orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut memiliki dinamika yang menarik, mulai dari proses waktu yang panjang hingga 2021 karena penetapan hasil pemilihan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan pemungutan suara ulang hingga selisih suara yang sangat sedikit dalam penentuan kemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kontestasi politik untuk menentukan orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut diikuti oleh tiga pasang calon. Pertama, Cek Endra berpasangan dengan Ratu Munawaroh yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Kedua, Gubernur Pertahana Jambi Fachrori Umar berpasangan dengan Syafril Nursal yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hanura, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Ketiga, Al Haris berpasangan dengan Abdullah Sani yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Keadilaan Sejahtera & Partai Kebangkitan Bangsa (Almunanda, 2020).

Beberapa lembaga survei sebelumnya telah merilis elektabilitas beberapa pasangan calon, salah satunya survei Puspoll Indonesia bulan November 2020, pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh memiliki elektabilitas tertinggi dengan mencapai angka 42,2% disusul dengan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani dengan angka 26,4% dan terakhir pasangan Fachrori Umar dan Syafril Nursal pada angka 23,3% (Dunan, 2020). Bukan hanya satu lembaga survei yang memprediksi kemenangan pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh, survei dari Charta Politika yang dirilis pada bulan September tahun 2020 juga menunjukkan keunggulan angka elektabilitas pada pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh dengan posisi teratas yakni 20,6%, selanjutnya elektabilitas Al Haris dan Abdullah Sani dengan perolehan 16,8% dan terakhir Fachrori Umar dan Syafril Nursal dengan angka 10,9% (Wahyudi, 2020).

Gambar 1.1
Hasil Hitung Suara Pilkada Provinsi Jambi



Sumber : pilkada2020.kpu.go.id

Berdasarkan Gambar 1 terlihat hasil dari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, pasangan Al Haris dan Abdullah Sani unggul dengan meraih suara terbanyak dengan angka persentase 38,1% atau total sebanyak 597.518 suara. Sementara pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh meraih angka persentase 37,3% dengan perolehan suara sebanyak 585.400 suara. Sedangkan Gubernur pertahana Fachrori Umar beserta pasangannya Syafril Nursal justru mendapatkan suara paling sedikit dengan angka persentase 24,6% atau total sebanyak 385.318 suara (Kurniawan, 2020).

Dinamika sengketa hasil pilkada yang berlanjut di Mahkamah Konstitusi berlangsung cukup alot, pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh menggugat hasil pemilihan dengan tudingan terhadap pasangan Al Haris dan Abdullah Sani telah melakukan kecurangan pada proses pilkada. Pasangan dengan slogan “Jambi Cerah” tersebut bahkan menggandeng pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum mereka. Permohonan pasangan calon ini secara tertulis meminta dilakukannya pemungutan suara ulang pada 15 kecamatan yang tersebar di lima kabupaten Provinsi Jambi (Santoso, 2020). Proses gugatan hasil pilkada tersebut pada akhirnya berbuah hasil bagi pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh. Adapun putusan dari Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar segera dilakukannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan Gubernur Jambi, khususnya di 88 tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di lima kabupaten dengan rentang waktu paling lama 60 hari kerja sejak keputusan tersebut diumumkan (Hanapi, 2021).

Pasca diadakan pemungutan suara ulang (PSU), pasangan Al Haris dan Abdullah Sani ternyata kembali meraih kemenangan, bahkan terjadi kenaikan

selisih suara yang semula sebelum pemungutan suara ulang diperoleh 10.283 suara menjadi 12.864 suara. Akumulasi total perolehan suara Al Haris dan Abdullah Sani adalah 601.630, sedangkan pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh memperoleh 587.845 suara. Hasilnya, pasangan Al Haris dan Abdullah Sani mendapatkan total 55,62% suara dan pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh hanya mendapat 42,93% suara, akhirnya dengan serangkaian proses yang panjang tersebut berhasil mengantarkan pasangan calon Al Haris dan Abdullah Sani menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hitung Suara Pilgub Jambi 2020 di Kabupaten Kota Provinsi Jambi
Pasca Pemungutan Suara Ulang

Wilayah	CE - Ratu	Fachrori - Syafril	Haris - Sani
Kerinci	29.476	50.321	26.922
Merangin	34.536	16.114	116.242
Sarolangun	82.902	9.556	37.027
Batanghari	63.049	30.494	58.374
Muaro Jambi	62.839	27.741	65.094
Tanjung Jabung Barat	69.117	31.934	45.929
Tanjung Jabung Timur	53.401	24.862	45.660
Bungo	52.389	78.977	31.926
Tebo	54.519	37.224	41.342
Kota Jambi	74.337	38.354	126.252
Kota Sungai Penuh	11.280	35.957	6.862
Total	587.845	381.534	601.630

Sumber : pilkada2020.kpu.go.id

Fenomena kemenangan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani bila ditinjau dari pemetaan politik berdasarkan perolehan suara, dukungan dan tim sukses. Pasangan ini memperoleh dukungan secara mayoritas dari kalangan Islam. Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, partai pendukung pasangan Al Haris dan Abdullah Sani adalah partai yang berbasis Islam, sebut saja Partai Keadilan Sejahtera yang anggotanya terdiri dari gerakan Islam Ikhwanul Muslimin dan

kental dengan kultur Arab, selain itu basis pendiri PKS yang dikenal mengakar kuat dan berawal dari lembaga dakwah kampus ataupun rohis yang ada disekolah membuat kultur Islam pada partai ini dapat nilai sangat kuat (Nurdiyanto, 2021). Selain itu ada Partai Amanat Nasional yang juga menyokong pasangan ini, meskipun PAN dikenal sebagai partai yang moderat, akan tetapi kultur Islam Muhammadiyah tetap melekat kuat pada partai ini, mulai dari para pendiri partai ini yang merupakan tokoh pimpinan organisasi Muhammadiyah seperti Amien Rais yang pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehingga kultural Islam tetap tumbuh dan melekat pada partai yang dilahirkan pasca reformasi ini.

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa juga merupakan salah satu partai pendukung pasangan Al Haris dan Abdullah Sani, PKB dikenal sebagai partai yang sangat kental dengan ajaran Nahdlatul Ulama, dikarenakan sejarah terbentuknya PKB merupakan jasa dari para Kiyai Nahdlatul Ulama, maka dari itu hampir seluruh pengurus PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Ketokohan Kiyai yang melekat pada diri Abdullah Sani juga dinilai sebagai salah satu faktor pemersatu Nahdlatul Ulama dalam mendukung kemenangan pasangan ini, Abdullah Sani dikenal sebagai seorang kyai terkemuka dari kalangan Nahdlatul Ulama, ia bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi tahun 2003-2008.

Berdasarkan pada fenomena-fenomena yang penulis jelaskan sebelumnya, terlihat beberapa hal menarik untuk dikaji lebih lanjut, Pertama, mulai dari partai pengusung pasangan Al Haris dan Abdullah Sani yang berbasis Islam yang diikuti oleh pengaruh dari pada masyarakat Nahdlatul Ulama dan hadirnya PKB sebagai partai pengusung. Kedua, ketokohan Abdullah Sani sebagai Kiyai dari kalangan

Nahdlatul Ulama yang menjadi calon wakil gubernur. Ketiga, hal menarik selanjutnya adalah beberapa lembaga survei telah mengindikasikan kemenangan pada pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh akan tetapi pada hasil perolehan suara menunjukkan sebaliknya. Keempat, dinamika proses pemilihan Gubernur yang cukup alot hingga Mahkamah Konstitusi serta putusan sengketa agar diadakannya pemungutan suara ulang yang justru menyebabkan kenaikan suara pada pasangan Haris-Sani yang sebelumnya diduga melakukan kecurangan pada proses pilkada. Fenomena-fenomena tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana bentuk relasi politik pasangan Al Haris dan Abdullah Sani terhadap kelompok Islam dalam Pemilihan Gubernur Jambi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemetaan relasi politik pasangan Al Haris dan Abdullah Sani terhadap kelompok Islam dalam pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020?
2. Bagaimana peranan kelompok Islam dalam kemenangan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemetaan relasi politik pasangan Haris-Sani dengan kelompok Islam pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020.
2. Untuk menganalisis peranan kelompok Islam dalam kemenangan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian relasi politik Islam dalam pemilihan kepala daerah memang sudah pernah dilakukan, akan tetapi objek dan waktu dari penelitian ini tentunya memberikan pembaharuan ide yang mana diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya bisa memberikan sumbangsih dalam bidang ilmu politik, khususnya menambah referensi pada kajian relasi agama & politik.

Secara praktis, bagi peneliti dapat menjadi bahasan informasi yang mampu dikembangkan dalam berbagai aspek teknis, seperti menjadi pedoman taktis politik, memahami fenomena, serta menjadi bahan perbandingan bagi para praktisi politik yang ada di daerah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan bahwa salah satu faktor sosial budaya yang sangat berpengaruh dalam dinamika politik Indonesia adalah agama (Wati, 2021). Agama dalam hal ini adalah Islam sebagai agama mayoritas yang memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan pada gerakan sosial politik di Indonesia, bahkan keterlibatan agama dalam dunia politik sudah terjadi sejak kerajaan nusantara masih berdiri sebelum Indonesia merdeka (Lestari, 2018).

Keterlibatan agama dan politik merupakan proses resiprokal antara yang satu dengan lainnya. Kedua entitas tersebut (agama dan politik) memiliki proses tarik menarik dalam kepentingan. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam membangun struktur negara serta pendisiplinan masyarakat (Jati, 2014). Pengaruh keagamaan di Indonesia disebarluaskan oleh tokoh agama yang dikenal dengan sebutan “ulama”, selain itu ada juga istilah dalam menamakan tokoh agama ini dikalangan

masyarakat Nahdatul Ulama yang juga sudah diartikan secara umum oleh masyarakat dengan penyebutan “kyai”, studi tentang istilah ini telah dijelaskan oleh Hiroko Horikoshi dalam (Nasir, 2015) yang membedakan istilah kyai dan ulama, dijelaskan bahwa Ulama lebih memerankan fungsi administratif sebagai pejabat keagamaan, sedangkan Kyai lebih bermain pada tataran kultural tradisional. Meskipun begitu pada kenyataannya peran dan fungsinya juga hampir tidak ada pembeda pada kehidupan sosial politik masyarakat, istilah penyebutan tokoh agama hanya lebih mengarah pada kebiasaan masyarakat setempat.

Ulama pada mulanya dikenal pada sektor pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, madrasah, dan masjid yang aktif dalam kegiatan kependidikan dan sosial masyarakat, seiring perkembangan waktu peran ulama berkembang dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (Helmiannoor & Musyarapah, 2019). Kiprah dan peran ulama semakin meluas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, selain sebagai guru spiritual para ulama juga menjadi tempat curahan hati umatnya yang membutuhkan bantuan nasihat yang menyangkut masalah pribadi, kelompok, keluarga maupun permasalahan umum lainnya. Masalah yang masyarakat curahkan kepada ulama itu biasanya seperti meminta doa agar bisnis dan dagangnya lancar, ingin agar sukses dalam pendidikannya dan dijauhkan dari malapetaka (Rasyid, 2019).

Ulama dipandang sebagai pewaris para Nabi dan pembawa kebenaran, mereka dipandang sebagai pembawa kabar kebenaran. Ulama mewariskan ilmu kepada masyarakat, penyampaian ilmu ini disebut dengan dakwah, yang mana ulama mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi munkar (Paisal, 2021). Kekuatan pengaruh ulama menurut (Dhofier, 2011) terletak pada dua hal. Pertama, ulama

memiliki perasaan kemasyarakatan yang sangat tinggi. Kedua, ulama selalu melandaskan segala sesuatu kepada kesepakatan bersama, kedua hal tersebut menjadi alasan penting terhadap penerimaan pendapat ulama dalam kehidupan masyarakat. Peran ulama juga sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan kekuasaan., sinergitas antara ulama (pemimpin agama) dan Umara (pemimpin pemerintahan) diharapkan menjadi suatu keunggulan dalam membangun suatu bangsa yang memiliki pendirian yang kokoh nasionalis dan religius (Aminullah, 2020).

Status sosial ulama sebagai tokoh elit dalam hierarki masyarakat, membuat nama besar mereka dapat menyelesaikan segala problematika sosial, bahkan menjadi panutan hidup masyarakat. Pengaruh ulama dinilai sangat besar bahkan melebihi pemimpin formal pada tataran administratif seperti Lurah, Camat, Kepala Dinas, hingga Sekretaris Daerah. Figuritas ulama bersamaan dengan nama besar pesantren ataupun madrasah yang dipimpin olehnya menjadi faktor yang dominan sehingga banyak tokoh politik datang meminta dukungan maupun doa restu yang diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas mereka (Hannan & Abdillah, 2019). Kendati demikian, tidak semua kandidat yang meminta dukungan ke ulama diakomodir permintaannya. Biasanya dukungan akan diakomodir apabila kandidat atau parpol tersebut memiliki visi yang sama dengan pondok pesantren ataupun mayoritas masyarakat di lingkungan tersebut, adakalanya ulama menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada santri ataupun masyarakat untuk menentukan calon pemimpin mereka sendiri (Kusmayadi et al., 2017).

Fenomena keterlibatan Ulama ataupun tokoh agama dalam pemenangan kandidat di kontestasi politik dalam penelitian (Assiddiq, 2020) dijelaskan bahwa

para ulama memiliki strategi tersendiri, yaitu komunikasi politik sebagai *Opinion Leader*, mediator politik dan *vote getter*. Peran Ulama terlihat dalam kegiatan dakwah, pengajian dan majelis ilmu, yang mana disela-sela kegiatan Ulama menunjukkan sikap politiknya terhadap kandidat tertentu. Strategi lain terutama pada daerah perkampungan menggunakan model *Silent Majority*, teknik ini menggunakan kyai kampung sebagai jembatan komunikasi politik untuk mendapat simpati masyarakat serta menjadi jembatan penyambung aspirasi dan pendapat masyarakat dari bawah. Peranan dari kyai politisi sangat berpengaruh di sini, ketika tokoh tersebut mengawal kepentingan golongan organisasi dan partainya, gerakan memobilisasi masyarakat akan lebih terang-terangan.

Kyai politisi berperan sebagai konsolidator dan merangkul kyai non-politisi, jaringan tersebut berdampak signifikan terhadap perolehan suara. Kelompok ulama yang solid mendukung kandidat tentunya menunjukkan kekuatan politik yang merata untuk meraih dukungan masyarakat umum, hal ini terjadi dikarenakan pergerakan menjadi kolaboratif yang bergerak pada level elit maupun level akar rumput (Aziz, 2021). Pengaruh Ulama pada akhirnya banyak menimbulkan berbagai macam perspektif di tengah masyarakat, salah satunya pendapat bahwa ulama yang berkiprah pada birokrasi ataupun politik cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama kepada masyarakat (Rasyidin, 2021), perspektif ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap ulama semakin tinggi.

Fenomena yang paling kontroversial adalah ketika calon Gubernur pertahan Basuki Cahaya Purnama atau dikenal dengan Ahok mengutip surat Al-Maidah 51 yang mendapat tanggapan sebagai penista agama, keberlanjutan tragedi ini sampai

pada dukungan para ulama dan ormas Islam (Nastiti & Ratri, 2018). Pemenangan pasangan calon Anies-Sandi dimobilisasi oleh para ulama dengan membuat kampanye persatuan umat Islam untuk mengalahkan Ahok yang dinilai sebagai penista agama (Fajar & Kamarudin, 2021). Gerakan-gerakan anti pemimpin non muslim ataupun etnis Tionghoa ini bukan saja diinisiasikan oleh golongan masyarakat muslim modernis dan radikal, akan tetapi muslim konservatif seperti kalangan organisasi Nahdatul Ulama yang sering dikatakan sebagai pejuang toleransi, ternyata juga terbukti memiliki pendaman sentiment yang sama untuk menolak pemimpin non muslim (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Keterlibatan ulama juga tidak berhenti sampai situ, dalam penelitian (Tangkas, 2021) pemilihan Presiden tahun 2019 juga menjadikan momentum kelompok ulama dalam memberikan pengaruh politik kepada masyarakat banyak, hal ini bermula pada munculnya GNPf Ulama (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama). Kelompok ini terbentuk dari kumpulan ormas Islam oposisi dan juga anggota PA 212, mereka menggelar Ijtima Ulama untuk menggalang dukungan kepada pasangan calon Presiden & Wakil Presiden Prabowo-Sandi.

Fenomena serupa dijelaskan dalam penelitian (Sonny, 2019) yang membahas bagaimana dukungan dari organisasi Nahdatul Ulama kepada kandidat Jokowi-Amin. Kiyai Ma'ruf Amin sendiri merupakan mantan ketua Majelis Ulama Indonesia pusat sekaligus tokoh besar dari organisasi Nahdatul Ulama. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan 65% di Provinsi Jawa Timur yang notabnya adalah basis Nahdatul Ulama terbesar di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa selanjutnya politik identitas keagamaan masih akan berlanjut selalu di Indonesia. Penelitian lebih lanjut mengenai relasi ulama dan politik, ditulis oleh (Ginanjari et

al., 2021) menunjukkan bahwa dukungan ulama kepada pasangan calon dilandasi oleh beberapa faktor, yaitu ideologi, keumatan, agama, ekonomi dan etika, sedangkan dalam penelitian (Nasir, 2015) membahas terkait pengaruh besar kyai dan ideologi agama Islam terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Kota Tasikmalaya, pengaruh ketokohan pemuka agama yang terdiri dari pimpinan pesantren memiliki dominasi yang kuat pada struktural partai Islam seperti PKB dan PPP, selain itu kultural masyarakat juga sudah lama terafiliasi dengan organisasi Nahdatul Ulama sehingga membuat kursi legislatif dari partai Islam didominasi oleh partai Islam tersebut.

Penelitian (Sanusi, 2019) membahas pengaruh ketokohan individu seorang kandidat Wakil Presiden yang dikenal sebagai ulama besar memberikan pengaruh kuat dan dukungan terorganisir dari kalangan masyarakat Muslim. Penelitian yang membuktikan peranan tokoh agama dalam politik praktis juga dijelaskan dalam penelitian (Aziz, 2021) yang membuktikan peranan kiyai dalam memobilisasi kemenangan kandidat, peranan di sini juga berkaitan dengan bisnis dan kepentingan organisasi Islam dalam kesepakatan solidaritas politik para kiyai.

Penelitian (Assiddiq, 2020) sebelumnya menjelaskan bahwa para ulama memiliki strategi tersendiri dalam berperan pada kegiatan dakwah, pengajian dan majelis ilmu, yang mana disela-sela kegiatan Ulama menunjukkan sikap politiknya terhadap kandidat tertentu, fenomena ini merupakan bentuk implementasi dari teori relasi kekuasaan yang mana kekuasaan memiliki jaringan yang menyelip dalam setiap lini, tempat dan sistem sosial. Sedangkan pengaruh ketokohan individu menunjukkan bahwa kharismatik calon Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang dikenal sebagai Ulama besar memberikan pengaruh kuat dan dukungan terorganisir

dikalangan masyarakat Muslim, fenomena ini dapat diterjemahkan sesuai dengan teori otoritas kharismatik dimana kharisma yang melekat pada individu bergantung dengan pencapaian ataupun ketokohnya pada peran sebelumnya (Sanusi, 2019). Peranan tokoh agama dalam politik praktis juga telah dijelaskan dalam penelitian (Aziz, 2021) yang membuktikan peranan Kiyai dalam memobilisasi kemenangan kandidat, peranan di sini juga berkaitan dengan bisnis dan kepentingan organisasi Islam dalam kesepakatan solidaritas politik para Kiyai, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai bentuk dari implementasi teori peran dimana setiap orang memiliki fungsi identik pada statusnya pada struktur sosial ataupun kedudukan yang memiliki kewajiban terhadap sesuatu.

Penulis memandang situasi yang menjadi latar belakang penelitian sangat berkaitan erat dengan teori yang penulis tawarkan, yaitu bagian dari teori kekuasaan yang mencakup relasi kekuasaan antara kandidat dan relasi politik kelompok Islam yang berpengaruh terhadap pandangan pilihan politik masyarakat, dimana dalam hal ini pemilih merupakan mayoritas beragama Islam dan juga pasangan calon Al Haris dan Abdullah Sani merupakan kandidat yang diusung oleh partai Islam serta memiliki keterikatan khusus dengan beberapa ormas dan kelompok Islam tertentu.

1.6 Teori Kekuasaan

Berdasarkan berbagai konsep politik yang paling banyak dibahas adalah kekuasaan, kekuasaan merupakan aspek yang paling penting dalam politik. Harold D. Laswell mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Esensi dari kekuasaan sendiri adalah hak individu atau

kelompok untuk mengadakan sanksi terhadap seseorang atau sekelompok yang tidak mematuhi intruksi kekuasaan yang sah tersebut (Budiardjo, 2015). Arahan ataupun intruksi ulama tersebut dapat berbentuk suatu fatwa yang menjadi acuan, dalam konteks formal fatwa agama dijadikan sebagai acuan hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan yang berasal dari fatwa MUI memberikan sanksi hukum dari negara, sedangkan secara informal, kedudukan fatwa tidak memberikan sanksi hukum negara, akan tetap fatwa dapat menjadi media rekayasa sosial yang dikembalikan kepada individu masing-masing (Setiyanto, 2018).

Kekuasaan memiliki jaringan dan hubungan luas yang disebut sebagai relasi, kekuasaan menyelinap dalam setiap lini, tempat, dan sistem sosial. Michel Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersemayam pada satu elemen atau struktur saja, melainkan beroperasi dalam wilayah yang luas, sehingga keberadaannya menyebar di banyak tempat dan memiliki sifat menormalisasi susunan-susunan dalam struktur sosial masyarakat. Sederhananya, kekuasaan dirumuskan sebagai entitas aktif yang selalu bergerak dalam keseluruhan sistem, dirinya berbentuk jaringan atau relasi sosial, baik itu dalam ekonomi, pendidikan, budaya, politik, ilmu pengetahuan, bahkan dalam wilayah yang sakral seperti agama sekalipun (Hannan & Abdillah, 2019).

Kekuasaan beroperasi dalam wilayah yang luas, pengertian disini dapat dijelaskan sebagai kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu secara legal, kewenangan tersebut dinamakan otoritas. Sosiolog Max Weber mengatakan ada tiga macam otoritas, yaitu otoritas tradisional, otoritas rasional (legal), dan otoritas kharismatik. Otoritas ini memiliki arti yang sama dengan wewenang. Menurut

Weber, otoritas kharismatik, tradisional, dan rasional memiliki perbedaan yang terletak pada hubungan antara tindakan-tindakan dan dasar hukum yang berlaku.

Otoritas *pertama* menurut Weber dalam (Soekanto, 2015) adalah otoritas tradisional. Otoritas ini dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah lama sekali memiliki kekuasaan di dalam masyarakat tertentu. Titik tekanan otoritas ini adalah karena kelompok ini memiliki kekuasaan dan otoritas yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Karena sudah terlalu lamanya golongan ini memegang kekuasaan, maka masyarakat percaya dan mengakuinya. Otoritas yang *kedua* adalah otoritas rasional/ lega. Otoritas ini bersandar pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum yang dimaksud adalah hukum formal yang memiliki batasan, ketentuan, prosedur, dan memiliki alat-alat hukum yang jelas, sehingga hukum ini nantinya mengikat seluruh masyarakat, hal ini menjadi referensi dari pengabsahan otoritas yang dijalankan oleh pemangku otoritas. Selanjutnya Otoritas yang *ketiga* menurut Weber adalah otoritas kharismatik. Otoritas kharismatik adalah sebuah otoritas yang bersumber pada kharisma dalam diri seseorang, kharisma ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada individu-individu tertentu saja. Contoh dari orang yang memiliki otoritas ini yaitu kharisma yang ada pada diri Nabi, penguasa terkemuka, para wali, tokoh adat dan ulama.

Kharisma bertumpu pada sebuah bakat kepemimpinan tertentu dari seorang individu, bahkan tak jarang bakat kepemimpinan ini bisa disebut kepemimpinan luar biasa yang tidak dimiliki semua orang. Kepemimpinan yang bertumpu pada otoritas kharismatik dapat berkurang bahkan hilang, jika ternyata individu tersebut berbuat kesalahan yang dianggap fatal oleh masyarakat. Kesalahan fatal tersebut

terjadi jika individu tadi melanggar nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang ada di dalam masyarakat. Melalui sebuah kharisma yang dapat menghasilkan pengikut yang sangat besar dan setia, banyak yang beranggapan bahwa pemimpin-pemimpin yang memiliki kharisma tadi, diberkahi kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan (*supernatural power*). Dari sifatnya yang cenderung irasional, tidak ada kaidah-kaidah tertentu yang dapat melegalkan otoritas kharimatik ini. Sampai dengan saat ini pun, sulit sekali mencari penyebab mengapa akhirnya seseorang memiliki kharisma dalam dirinya (Asep, 2010).

Otoritas yang melekat pada individu tentunya harus dibarengi dengan peran dan tindakannya. Peran dalam kajian sosiologis identik dengan sebuah perilaku dari seseorang yang memiliki sebuah status tertentu dalam sebuah masyarakat atau dapat juga diartikan sebagai fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika seseorang itu menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Lebih lanjut, Peranan menurut (Suhardono, 2016) diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan atau status. Setiap individu dapat memiliki sejumlah status dalam sebuah masyarakat, dan diharapkan dari status tersebut dapat menghasilkan sebuah peran yang berfungsi dengan baik sesuai dengan status sosial yang dimiliki individu tersebut.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan tidak dapat dipisahkan-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2015).

Beberapa definisi diatas seperti relasi, otoritas, dan peran merupakan aspek penting dari penjelasan lebih lanjut tentang kekuasaan, oleh sebab itu relasi politik kekuasaan yang dimaksud dalam penelitian ini bertumpu pada kajian teoritis definisi tersebut, hal itu bertujuan untuk memudahkan analisis penulis dalam melihat relasi kekuasaan politik antara para kandidat dengan kelompok Islam, serta juga melihat bagaimana kekuasaan informal yang melekat pada para ulama dan kelompok Islam tersebut dapat mempengaruhi arah pikiran pilihan politik masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Olahan Penulis, 2022

1.8 Operasionalisasi Konsep

- a. Relasi sosial dalam struktur masyarakat diartikan sebagai hubungan antara suatu kelompok dengan sekelompok lainnya untuk mencapai kepentingan tertentu berdasarkan beberapa kriteria seperti ideologi, kegiatan ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan.

1. Relasi sosial dalam struktur ideologi : Partai dengan ideologi Islam, organisasi masyarakat Islam.
2. Relasi sosial dalam struktur ekonomi : kelompok Islam yang memiliki sumber daya ekonomi tertentu seperti kepemilikan pondok pesantren, madrasah, bisnis syariah dan lembaga filantropi.
3. Relasi sosial dalam struktur pendidikan : seorang individu dari kelompok Islam yang berperan sebagai guru/ dosen pada sektor pendidikan formal seperti mengajar di pondok pesantren, madrasah, sekolah umum, hingga universitas. Sedangkan dalam sektor informal, individu tersebut dapat menjadi guru pada organisasi pendidikan, majelis taklim, forum keilmuan agama, ataupun menjadi pembicara pada beberapa pelatihan dan seminar umum.
4. Relasi sosial dalam struktur budaya : banyak individu yang berasal dari kelompok Islam yang mendapat gelar dari lembaga adat daerah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya dalam berdakwah dan mengajak pada kebaikan, individu tersebut juga dinilai sebagai tokoh adat dikarenakan peran ulama dalam membentuk adat masyarakat sudah ada sejak masa penyebaran Islam di Indonesia, sebagai contoh dakwah agama Islam yang diiringi dengan budaya masyarakat lokal yang dibawakan oleh Walisanga, pembaruan adat masyarakat Minangkabau menjadi Islam oleh Islamil Alkhalidy Alminangkabawi dan Ahmad Khatib Alminangkabawi.
5. Relasi sosial dalam bidang politik : banyak individu dari kelompok Islam yang menjabat pada jabatan politik tertentu, mulai dari pengurus

partai politik khususnya partai politik yang berideologi Islam, lalu yang menduduki jabatan lembaga struktural formal non kementerian, staf ahli, Kepala Desa, Dewan Perwakilan Rakyat, Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri, hingga tataran eksekutif tertinggi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gusdur) merupakan contoh tokoh dari kelompok Islam yang pernah menduduki jabatan Presiden. Selanjutnya pada tahun 2019 lalu, Ma'aruf Amin merupakan ulama yang menduduki jabatan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia.

- b. Otoritas kharismatik merupakan otoritas yang bersumber pada kharisma dalam diri seseorang, kharisma ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada individu-individu tertentu saja. Melalui sebuah kharisma yang dapat menghasilkan pengikut yang sangat besar dan setia, hal ini bisa disebut dengan pengakuan yang subjektif karena bergantung pada perspektif mayoritas. Konsep otoritas kharismatik pada penelitian ini dilihat dari kharisma yang bersumber pada diri individu yang berasal dari kelompok Islam, seperti ulama/ kyai.
 1. Kharismatik kepemimpinan umat : ulama memiliki kedudukan sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh dan menghasilkan pengikut setia dari kalangan majelis keagamaan, organisasi Islam, dan para santri.
 2. Ulama mendapatkan pengakuan oleh masyarakat dalam bidang spiritual keagamaan : hal ini membuat masyarakat umum percaya dengan fatwa dan dakwah ulama, pengaruh kepercayaan ini juga

membuat sebagian kalangan masyarakat menilai sikap dan arahan politik para ulama menjadi suatu yang benar.

- c. Peran diartikan sebagai konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, tidak ada peranan tanpa ada kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peran mewakili aspek dinamis dari sebuah status, yang dapat diartikan jika seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan status yang ia emban maka dirinya telah melaksanakan sebuah peran. Konsep peran pada studi ini dimaksud sebagai perilaku para individu yang berasal dari kelompok Islam yang dalam hal ini menjalankan kedudukan pada struktur sosialnya untuk melakukan relasi kekuasaan dengan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat berserta hasil pemilihan Gubernur Provinsi Jambi.
 1. Peran Aktif didefinisikan sebagai peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam organisasi, kegiatan dan lingkungan sosial. Indikator tersebut dapat dilihat dari kehadiran serta kontribusinya terhadap suatu organisasi, kegiatan, dan lingkungan sosial tersebut. Peran dalam konsep penelitian ini difokuskan pada peran ulama terhadap lingkungan sosial dan organisasi yang diikutinya.
 2. Peran sebagai strategi didefinisikan bahwa peran merupakan suatu strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*) yang dalam hal ini diperankan oleh para ulama saat

mempromosikan dan mengajak masyarakat untuk mendukung serta memilih kandidat politik tertentu.

- d. Fungsi dalam menjalankan kedudukan sosial adalah semua aktivitas yang melekat pada diri ulama atau individu dari kelompok Islam dengan produk kedudukan sosial tertentu, sebagai contoh:
 1. Fungsi ulama/ individu dari kelompok Islam sebagai pemimpin agama, ulama merupakan sosok yang memahami ilmu agama secara mendalam sehingga menjadi rujukan masyarakat untuk bertanya berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan.
 2. Fungsi ulama/ individu dari kelompok Islam sebagai tokoh masyarakat, ulama dinilai sebagai sosok yang akhlakul karimah, artinya memiliki integritas dan pribadi yang kuat serta menjadi panutan masyarakat. Masyarakat tidak hanya melihat ulama dari keilmuan yang didakwahnya, tetapi juga melihat opini, pendapat, sikap, dan keseharian kehidupan ulama. Tidak ada *gap* antara yang diucapkan dengan apa yang dilakukan ulama.
- e. Hak mengadakan sanksi menurut merupakan esensi dari kekuasaan, yang mana itu diartikan sebagai hak individu atau kelompok untuk mengadakan sanksi sosial terhadap seseorang atau sekelompok yang tidak mematuhi intruksi kekuasaan tersebut. Pemberian sanksi pada studi ini, diberikan oleh para ulama atau individu yang berpengaruh dari kelompok Islam yang dinilai memiliki kekuasaan terhadap umatnya,
 1. Sanksi Internal, memberikan sanksi pada lingkaran internal diberikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap arahan dan perintah para ulama

dalam memilih kandidat tertentu. Sanksi tersebut berbentuk sanksi sosial yang dapat diberikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pemberian sanksi disini juga dapat dimaksudkan pada konteks internal keagamaan seperti teguran lisan maupun tertulis, ataupun sanksi sosial seperti berkurangnya peran dan respon terhadap individu yang tidak mematuhi instruksi ulama, hingga dijauhi para pengikut yang setia terhadap ulama. Adapun ruang lingkup sanksi ini dilakukan pada santri pondok pesantren, dan anggota majelis pengajian.

2. Sanksi eksternal, sedangkan sanksi yang dilakukan dalam lingkaran eksternal dapat berupa sindiran dari ceramah ataupun khutbah yang dilakukan ulama di tempat-tempat umum ataupun yang disiarkan di media massa yang mengarah pada individu yang tidak patuh.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses inkuiri pemahaman berdasarkan tradisi inkuiri metodologis yang berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan terperinci dari informan, dan melakukan penelitian dalam pengaturan alami (Creswell, 2018).

Adapun beberapa alasan mengapa penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian kualitatif memberikan peluang bagi pengkajian mendalam yang berada di dalam diri masing-masing individu, *Kedua*, peneliti bisa mendapatkan informasi historis dari para informan yang lebih

mengetahui bagaimana proses dan mengalami keterlibatan langsung terkait kondisi yang terjadi. *Ketiga*, demikian penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti mengendalikan alur pertanyaan dan diskusi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi. Waktu yang digunakan untuk proses penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan, dua bulan untuk pengumpulan data dan satu bulan untuk analisa data yang meliputi penyajian dalam bentuk pembahasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pembahasannya, yang mana fokus pembahasannya hanya dalam lingkup pemetaan relasi politik kelompok Islam terhadap pasangan Al Haris dan Abdullah Sani secara umum hingga secara rinci pada teknis pemenangan.

1.9.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam rangka memperoleh informasi, keterangan, dan data-data yang diperlukan, penulis mendapatkan data berdasarkan jenis dan sumber sebagai berikut. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang memiliki pemahaman dan memiliki pengalaman langsung dalam melihat proses relasi politik kelompok Islam terhadap pasangan Haris-Sani. Adapun yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/ Posisi
1	M. Zayadi Ismail	Majelis Syuro DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi
2	Eko Suprayanto	Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jambi
3	Khusaini	Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi
4	Adyan Coga Guci	Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jambi
5	Andi Khatulistiwa	Ketua Gerakan Milenial Al Haris Sekaligus Mantan Aktivist Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

6	Wasril Tanjung	Ketua PKS Muda Institute Provinsi Jambi
7	Muhammad Sidik	Mantan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Jambi
8	Muhammad Yasin	Mantan Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
9	Donny Anggara	Sekretaris Dewan Koordinasi Wilayah Garda Bangsa Provinsi Jambi
10	Aidi Hatta	Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Muaro Jambi
11	Hasan Mabruri	Ketua Tim Pemenangan Center Haris-Sani

Sumber : Olahan Penulis, 2022

Adapun Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen partai, ormas Islam, dan catatan pribadi para tim pemenangan, serta berita dan tulisan yang berkaitan dengan fenomena Pemilihan Gubernur Jambi 2020 yang mana data tersebut berguna sebagai data pendukung, guna memperkuat data primer.

1.9.3 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, *focus group discussion* (FGD) dan eksperimen/ percobaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*In-depth Interview*) sebagai instrumen penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada partisipan bersifat terbuka dan tidak mengarah langsung kepada pertanyaan penelitian, akan

tetapi lebih kepada pembawaan pendekatan personal dan penggalian makna pada momentum wawancara.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, memilah bagian-bagian penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah dalam analisis data menggunakan model yang dibuat oleh (Creswell, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencatat semua hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan tentang pengaruh kyai secara menyeluruh yang kemudian melakukan reduksi data dengan cara memilih pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan mentransformasikan data global dari lapangan.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dapat dilakukan dengan menampilkan data berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan mengenai topik penelitian. Selanjutnya, peneliti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan teori yang telah disebutkan.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah apabila ditemukan bukti-bukti untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Ketiga langkah tersebut saling mempengaruhi. Pertama yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penelitian perbandingan dengan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini karena data-data yang didapatkan berdasarkan hasil analisis dari beberapa buku dan dokumen-dokumen lain, maka peneliti perlu mengelompokkan, mengambil data yang penting dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga data yang tidak penting dapat dibuang. Peneliti akan mereduksi data untuk dilakukan penyajian data. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam naskah Thesis ini, peneliti memiliki sistematika pembahasan sebagai bagian untuk mengelompokkan beberapa bab pokok. Adapun sistematika penulisan naskah Thesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teori – teori yang digunakan sebagai tinjauan atau landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan, kerangka berfikir, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisi tentang deskripsi umum lokasi penelitian, yang mana dalam hal ini adalah Provinsi Jambi secara umum, dan secara khusus membahas bagaimana aspek sosial, ekonomi dan politik.

BAB III : Pemetaan Relasi Politik Pasangan Al Haris dan Abdullah Sani Dengan Kelompok Islam

Bab ini membahas dan menganalisis data-data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara lapangan, khususnya dalam pemetaan relasi politik pasangan Al Haris dan Abdullah Sani dengan Kelompok Islam.

BAB IV : Peran Kelompok Islam Dalam Pemenangan Pasangan Al Haris dan Abdullah Sani

Bab ini membahas dan menganalisis data-data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara lapangan, khususnya pada peran teknis kelompok Islam dalam pemenangan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani.

BAB IV : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian secara ringkas dan berisi uraian mengenai kesimpulan hasil penelitian serta saran masukan terhadap peneliti